

**OPTIMALISASI MODAL POLITIK  
PASANGAN ISMET AMZIS-HARMA ZALDI  
PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH  
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2010**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Politik*

*Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh:

**YOVALDRI RIKI PUTRA**

**07193038**



**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2012**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Semenjak Indonesia memasuki era reformasi, maka semenjak itu dalam proses yang berkelanjutan lahirlah otonomi daerah di Indonesia, dengan berbagai perkembangannya seperti yang dirasakan saat ini. Salah satu yang paling menonjol adalah dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai wujud kedaulatan rakyat sampai ke tingkat lokal.

Kesempatan untuk ikut menentukan pilihan pada pemilu terbuka luas bagi seluruh warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini, diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 19 ayat 1, mengatakan :  
“Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”<sup>1</sup>.

Dalam momen Pemilihan Umum masyarakat tidak hanya mempunyai hak memilih, namun juga mempunyai hak untuk dipilih, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, untuk menjadi yang dipilih dalam pemerintahan, terbuka luas

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No.10 tahun 2008 tentang : Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

bagi seluruh masyarakat yang memenuhi syarat yang telah diatur oleh aturan yang berlaku. Dalam sebuah negara yang demokratis, termasuk di dalamnya negara Republik Indonesia, hak memilih dan dipilih merupakan sebuah keniscayaan. Artinya dalam kehidupan berbangsa yang demokratis, hak memilih dan dipilih harus dijamin pemenuhan akan hak tersebut.

Di Indonesia, sistem Pemilihan Umum dilakukan secara langsung. Artinya pemilih tidak lagi hanya memilih partai politik pilihan mereka pada pemilihan umum, melainkan dapat langsung menentukan calon pilihan mereka. Baik calon untuk legislatif (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota) maupun calon untuk eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota/Bupati dan Wakil Bupati).

Semakin kita sadari bahwa wajah demokrasi di Indonesia dipenuhi oleh semangat dan gairah persaingan<sup>2</sup>. Besarnya jumlah partai politik, sistem perhitungan berdasarkan suara terbanyak, pemilukada (Gubernur dan walikota/Bupati), dan pemilihan presiden secara langsung semakin menegaskan era persaingan terbuka dalam demokrasi di Indonesia. Ditengah-tengah persaingan politik yang semakin intens, kehadiran modal politik menjadi sangat penting. Dalam hal ini, pihak yang memiliki modal politik relatif besar dibandingkan dengan pesaingnya akan diuntungkan. Begitu juga sebaliknya, pihak yang memiliki modal politik jauh lebih kecil akan kesulitan untuk bisa bersaing apalagi memenangkan kompetisi politik.

---

<sup>2</sup> Firmanzah. 2010. *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan dan Marketing politik*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Hal. XXXVII

Bulan Juli tahun 2010 yang lalu merupakan musim Pemilihan Umum Kepala Daerah di Sumatera Barat. Satu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 14 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota/ Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan secara serentak. Salah satu pemilihan umum kepala daerah dilaksanakan oleh Kota Bukittinggi. Dalam pesta demokrasi di kota wisata tersebut muncul 5 pasang calon yang berkompetisi, yaitu, pasangan Ramlan Nurmatias-Azwar Risman Taher, Ismet Amzis-Harma Zaldi, Zulkirwan Riva'i-Baharyadi, Nursyamsi Nurlan-Yalvema Miaz dan Darlis Ilyas-Shabirin Rahmat.

Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Bukittinggi Tahun 2010 tersebut, muncul sebagai pemenang adalah pasangan Ismet Amzis dan Harma Zaldi dengan perolehan suara sebanyak 18.011 suara (42,66%), diantara perolehan suara pasangan calon lainnya yaitu, Pasangan Ramlan Nurmatias-Azwar Risman Taher sebanyak 10.888 suara (25,79 %), pasangan Zulkirwan Riva'i- Baharyadi sebanyak 9.208 suara (21,81%), pasangan Nursyamsi Nurlan-Yalvema Miaz sebanyak 3.044 (7,21%) dan pasangan Darlis Ilyas-Shabirin Rachmat 1.064 suara (2,52%)<sup>3</sup>.

Sebagai pasangan calon yang menang dalam Pemilukada tersebut, menarik untuk dilihat modal politik pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi diantara beberapa calon yang memiliki kekuatan modal ekonomi (uang) yang besar dari pasangan calon Ismet Amzis-Harma Zaldi, sebagaimana perbandingannya kita lihat dalam data. (Lihat Lampiran 1). Dari data terlampir tentang harta kekayaan calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2010 dapat dijelaskan bahwa, Pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi mampu mengalahkan pasangan calon lainnya

---

<sup>3</sup> Data Komisi Pemilihan Umum Daerah kota Bukittinggi.

yang mempunyai harta kekayaan yang lebih besar dari pada pasangan calon Ismet Amzis-Harma Zaldi, kecuali dengan pasangan Darlis Ilyas-Shabirin Rahmat<sup>4</sup>. Total kekayaan pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi rendah secara signifikan dari pasangan Ramlan Nurmatias-Azwar Risman Taher yang perolehan suaranya dibawah Ismet Amzis-Harma Zaldi. Dan juga, pasangan Zulkirwan Riva'i-Baharyadi lebih besar lagi kekuatan finansial pasangan ini dari pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi, yang mana pasangan ini menempati urutan ketiga perolehan suara.

Melihat harta kekayaan calon sebagai landasan untuk melihat modal ekonomi (uang) calon sangat penting. Karena dalam fenomena pemilihan umum secara langsung, pentingnya modal uang tidak terbantahkan lagi. Faktor pembiayaan merupakan faktor kritikal untuk sukses sebuah kampanye<sup>5</sup>. Pembiayaan sosialisasi politik oleh kandidat dalam sistem pemilihan langsung membutuhkan biaya yang sangat banyak. Biaya yang dikeluarkan untuk beberapa item seperti pengadaan baliho, spanduk, mobilisasi kampanye, iklan politik, aksi sosial, bahkan sewa konsultan politik, keseluruhan indikator diatas penting agar kandidat menjadi dikenal oleh pemilih.

Selanjutnya dari segi *track record* politik dan pemerintahan para pasangan calon, keseluruhan pasangan calon Walikota Bukittinggi Tahun 2010 merupakan wajah-wajah yang tidak asing lagi dalam dunia politik dan pemerintahan lokal Kota Bukittinggi. Seperti tertuang dalam data (Lihat Lampiran 2). Ismet Amzis bukanlah kandidat yang mendominasi jika kita lakukan identifikasi terhadap *track*

---

<sup>4</sup> Karena Darlis Ilyas merupakan calon yang sebelumnya merupakan walikota Payakumbuh yang di *impeachment* oleh DPRD Kota Payakumbuh , artinya mempunyai track record politik yang buruk.

<sup>5</sup> Adnan Nursal. 2004. *Political Marketing : Strategi Memenangkan Pemilu. Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*. Jakarta : Gramedia Pusataka Utama. Hal : 298.

*record* politik dan pemerintahan, sekalipun ia punya pengalaman yang banyak dalam politik dan pemerintahan. Nursyamsi Nurlan adalah kandidat bisa dikategorikan sebagai yang mendominasi dalam pengalaman politik dan pemerintahan, terutama dalam politik. Nursyamsi Nurlan adalah politisi yang telah menjabat sebagai pengurus DPP PBB, dan pernah duduk sebagai ketua Fraksi BPD MPR-RI periode 2004-2005. Dua kandidat yang berurutan dibawah Ismet Amzis perolehan suaranya pun bukan tokoh politik baru, Ramlan Nurmatias adalah mantan Ketua KPUD Kota Bukittinggi pada pemilukada tahun 2004, dan membuat gebrakan pada masa jabatannya itu dengan mengembalikan dana sisa anggaran KPUD Kota Bukittinggi sebanyak lebih kurang 700 juta rupiah kepada Negara. Sedangkan Zulkirwan Riva'i merupakan rival pasangan Djufri-Ismet Amzis pada pemilukada Kota Bukittinggi tahun 2004, Zulkirwan Riva'i yang lebih dikenal dengan panggilan haji buyuang ini pada waktu itu posisi kedua dalam perolehan suara, dan ia juga pernah menjabat sebagai ketua dewan Penasehat Partai Golkar Kodya Tanggerang.

Dilihat dari perspektif budaya, kedekatan para calon walikota Bukittinggi Tahun 2010 dengan budaya tidak ada yang mendominasi. Image "*urang kurai*" sama-sama melekat pada keluarga masing-masing calon walikota. Sebutan "*urang kurai*" menandakan sebagai keluarga yang berketurunan asli Bukittinggi. Namun menjadi ketertarikan bagi penulis, melihat pengalaman secara budaya yang dimiliki oleh Ramlan Nurmatias dan Zulkirwan Riva'i. Ramlan Nurmatias yang bergelar Datuak nan Basa, merupakan gelar datuk yang diberikan kaum suku Sikumbang asli kurai. Gelar datuk yang dimiliki oleh Ramlan Nurmatias menjadikannya memiliki akses untuk melakukan transformasi budaya

dilingkungannya, dan Kota Bukittinggi pada umumnya. Begitu juga dengan Zulkirwan Riva'i, dengan pengalaman pernah menjadi ketua LKAAM, maka Zulkirwan Riva'i juga mempunyai pengalaman atas akses untuk transformasi budaya di Kota Bukittinggi. Menariknya lagi dari Zulkirwan Riva'i adalah, ia juga , mempunyai akses tranformasi budaya di daerah perantauan, terlihat dari beberapa pengalamannya dalam beberapa organisasi budaya dan ikatan Minangkabau seperti (Pembina PASTI MinangKabau, Penyantun GEBU Minang, dan Dewan Penasehat Saudagar Minang), untuk diketahui organisasi GEBU Minang dan Saudagar Minang merupakan organisasi perantau minang yang saat ini tumbuh besar.

Pengalaman-pengalaman yang berhaluan kepada peningkatan kualitas manusia masing-masing calon Walikota Kota Bukittinggi tahun 2010 tidak ada yang mendominasi, termasuk Ismet Amzis sendiri sebagai pemenang, kecuali kalau kita melakukan identifikasi dari segi latar belakang pendidikan. Nur Syamsi Nurlan merupakan calon Walikota Bukittinggi yang mempunyai latar belakang pendidikan sampai pada tingkat akademis doktoral (S3), sedangkan Ismet Amzis, Ramlan Nurmatias, dan Darlis Ilyas lulusan sarjana (S1), dan Zulkirwan Riva'i lulusan Akademi Angkutan Udara Trisakti. Pengalaman organisasi juga merupakan akses peningkatan kualitas manusia. Para calon Walikota Bukittinggi keseluruhan merupakan para organisatoris yang berpengalaman. (lihat lampiran2)

Harma Zaldi yang menjadi pasangan Ismet Amzis sebagai Wakil Walikota, dari segi *track record* dalam politik dan pemerintahan, tidak mempunyai rekaman yang berarti. Bahkan lebih unggul beberapa calon Wakil Walikota dari pasangan lainnya. (Lihat Lampiran 3). Dari data terlampir tentang

*Track Record* Calon Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2010, terlihat bahwa, Harma Zaldi sebagai calon Wakil Walikota dari Ismet Amzis, dari segi *track record* dalam politik dan pemerintahan tidak sebanding dengan *track record* yang dimiliki Azwar Risman Taher sebagai calon Wakil Walikota dari Ramlan Nurmatias, Baharyadi sebagai calon Wakil Walikota dari Zulkirwan Riva'i, dan Yalvema Miaz sebagai calon Wakil Walikota dari Nursyamsi Nurlan. *Track record* menjadi perhatian penting karena dari sanalah dasar pemilih dapat menjatuhkan pilihan terhadap kandidat. Apalagi seorang kandidat yang baru muncul dalam konstelasi Pemilukada seperti Harma Zaldi, dan para calon wakil walikota lainnya-yang keseluruhannya adalah kontestan baru.

Pendekatan psikologis dalam teori perilaku memilih (*voting behaviour*) menjadi argumentasi penulis melihat permasalahan diatas. Kecenderungan pemilih adalah memperhatikan kedudukan kontestan pemilu dalam masyarakat dalam membangun sikap, persepsi dan orientasi politik. Studi Liddle dan Mujani<sup>6</sup> menyimpulkan faktor ketokohan menjadi tulang punggung untuk meraih suara. Sedangkan dari data terlampir bisa ditarik kesimpulan bahwa Harma Zaldi kalau dilihat dari pengalamannya masih ketinggalan ketokohnya dari calon wakil walikota lainnya. Selanjutnya Weber mengatakan, salah satu sumber legitimasi adalah hal-hal yang bersifat rasional<sup>7</sup>. Dalam hal ini *track record, background, prestasi* dan semua kinerja positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat bisa menjadi modal sosial bagi politisi.

---

<sup>6</sup> Saiful Mujani and William R Liddle 2010. Personalities, Parties and Voters. *Journal of Democracy* Volume 21, number 2 april 2010. National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press.

<sup>7</sup> Ibid, Hal : LVII

Status *incumbent* dari Ismet Amzis juga penulis identifikasi, yang sebelumnya menjabat sebagai walikota Bukittinggi setelah kursi walikota ditinggalkan oleh Djufri karena terpilih menjadi anggota DPR RI. Banyak pengamat melihat *incumbent* mempunyai peluang yang besar untuk menang dalam pemilihan umum, karena dari segi popularitas, *incumbent* tentunya lebih unggul dari calon yang *non-incumbent*. Namun Lingkaran Survei Indonesia menyimpulkan bahwa ternyata popularitas yang tinggi cenderung tidak diikuti pula dengan tingkat keterpilihan yang tinggi pula. Dari kesimpulannya Lingkaran Survei Indonesia menyatakan popularitas hanyalah potensi yang perlu diolah oleh *incumbent*<sup>8</sup>. Potensi yang perlu diolah yang dimaksudkan oleh Lingkaran Survei Indonesia tentunya melalui proses kampanye pemilu oleh pasangan calon.

Dari status *incumbent* Ismet Amzis ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dinamika *incumbent* Ismet Amzis berbeda dari *incumbent* kepala daerah yang ingin melanjutkan kepemimpinannya (contoh paling dekat dengan *incumbent* Djufri pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2005). Maka bisa dikategorikan pengaruh Ismet Amzis sebagai *incumbent* wakil kepala daerah masih kuat daripada *incumbent* kepala daerah, ditambah lamanya Ismet Amzis menjabat sebagai walikota pasca ditinggalkan oleh Djufri yang hanya kurang dari 1 tahun.

Dinamika *incumbent* kepala daerah dengan *incumbent* wakil kepala daerah sangat berbeda. Berbedanya dalam hal peluang memenangkan pemilihan umum. Sebagaimana data yang dipublikasikan oleh Lingkar Survei Indonesia sepanjang pilkada yang berlangsung di Indonesia pada tahun 2005-2006, bahwa dari

---

<sup>8</sup> Lingkaran Survei Indonesia. Edisi 02 Juni 2007. *Incumbent dan Pilkada*. Hal. 19.

keseluruhan *incumbent* wakil kepala daerah yang ikut pilkada di Indonesia, hanya 25,87 % yang mampu memenangkan pilkada. Sedangkan *incumbent* kepala daerah dari keseluruhannya yang ikut pilkada di Indonesia, 62,17 % berhasil memenangkan pilkada<sup>9</sup>. Sebagai pembanding untuk dapat lebih mempertajam data di atas, kita lihat majunya *incumbent* yang sama dinamikanya dengan Ismet Amzis, yaitu calon Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 Marlis Rahman, yang juga di angkat sebagai Gubernur Sumatera Barat setelah kursi Gubernur di tinggalkan Gamawan Fauzi karena ditunjuk sebagai Menteri Dalam negeri pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Namun Marlis Rahman yang berpasangan dengan Aristo Munandar kalah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Tahun 2010. Maka dapatlah kita memahami kesimpulan dari Lingkaran Survei Indonesia di atas tadi dengan argumen bahwa *incumbent* seperti Marlis Rahman berbeda pengaruhnya dengan *incumbent* kepala daerah lainnya, dan khususnya juga sama halnya dengan Ismet Amzis, tetapi Ismet Amzis bisa memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Pengalaman 5 tahun menjabat sebagai wakil walikota Bukittinggi pun tercederai, ketika beberapa orang yang berada dilingkaran kekuasaan Djufri dan Ismet Amzis terlibat kasus korupsi, termasuk Djufri sendiri dan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi pada waktu itu Khairul telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kasus ini tentunya berdampak pada persepsi positif masyarakat terhadap Ismet Amzis dan Partai Demokrat di Kota Bukittinggi, konkritnya mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Ismet Amzis yang maju sebagai *incumbent*.

---

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal 4-12

Kasus korupsi atas proyek pengadaan tanah untuk pembangunan kantor DPRD di daerah Manggih Ganting dan korupsi pembangunan pool mobil untuk Dinas Pertamanan Kota Bukittinggi sangat menjadi perhatian masyarakat Kota Bukittinggi, terutama pada masa-masa Pemilihan Legislatif diikuti juga pada masa-masa Pemilukada di kota Bukittinggi. Kasus korupsi ini terjadi pada tahun 2007, dan di ketengahkan oleh sebuah LSM yang bernama ARAK (Aliansi Rakyat Anti Korupsi) bersama masyarakat Manggis Ganting yang ikut membebaskan tanahnya. Djufri beserta beberapa bawahannya terbukti melakukan *mark-up* pembelian tanah masyarakat Manggis Ganting.

Sekalipun pada masa-masa terungkapnya kasus korupsi tersebut tidak melibatkan nama Ismet Amzis, namun sudah bisa di pastikan periode pemerintahan Djufri-Ismet Amzis telah tercederai dengan terungkapnya kasus korupsi ini, terutama pada masa-masa menjelang dilaksanakannya Pemilukada di Kota Bukittinggi. Dampak secara langsung terhadap Ismet Amzis adalah pengaruh *incumbent*-nya menjadi turun, terutama masalah kepercayaan di mata masyarakat, apalagi masalah korupsi telah menjadi perhatian yang serius di tengah masyarakat, ditambah lagi dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini, kasus korupsi yang melibatkan Djufri dan beberapa pejabat teras Pemerintah kota Bukittinggi lainnya adalah kasus korupsi yang pertama melibatkan kepala daerah di kota wisata tersebut.

Kasus korupsi tersebut murni berada pada lingkaran eksekutif pemerintahan Kota Bukittinggi. Walikota, Sekda, Asisten 1, Camat Manggih Ganting, Lurah, kabag pemerintahan, merupakan jabatan dilingkungan eksekutif. Maka tidak mungkin seorang Ismet Amzis yang pada waktu itu menjabat sebagai

Wakil Walikota tidak mengetahui segala tindak-tanduk yang menjurus pada kebijakan yang korup. Apalagi berdasarkan UU No 32. Tahun 2004, salah satu fungsi seorang wakil walikota adalah pengawasan terhadap aparatur pemerintahan. Terjadinya korupsi tersebut, menjadikan kredibilitas Ismet Amzis dalam melaksanakan tugasnya menjadi tercoreng, dan integritasnya secara moril juga ikut tercoreng.

## **B. Perumusan Masalah**

Pada penelitian ini, yang menjadi batasan ruang lingkup adalah :

Dengan berbagai modal politik yang dimiliki masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tahun 2010 yang telah penulis identifikasi, penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa modal yang tidak didominasi oleh pasangan Ismet Amzis dan Harma Zaldi namun didominasi oleh pasangan calon lain, yaitu modal ekonomi, modal budaya, modal manusia (dimana latar pendidikan didominasi oleh Nur Syamsi Nurlan) ditambah dengan track record politik dan pemerintahan yang tidak dimiliki oleh calon Wakil walikota dari Ismet Amzis yaitu Harma Zaldi, ditengah-tengah calon Wakil Walikota lainnya adalah pamong senior (birokrat senior) di Kota Bukittinggi. Terhadap status *incumbent* yang dimiliki Ismet Amzis, penulis berkesimpulan tidak terlalu berpengaruh seperti halnya status *incumbent* yang lainnya, dikarenakan pengaruh status sebagai *incumbent* wakil kepala daerah masih besar dari pada status sebagai *incumbent* kepala daerah. Apalagi, dengan mencuatnya kasus korupsi yang melibatkan mantan walikota Bukittinggi Djufri dan beberapa pejabat penting Kota Bukittinggi, yang pada masa itu Ismet Amzis menjabat sebagai wakil walikota, berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap

Ismet Amzis yang maju lagi sebagai calon walikota pada pemilukada Kota Bukittinggi Tahun 2010. Maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis adalah bagaimana pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi melakukan optimalisasi modal politik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Bukittinggi Tahun 2010?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis optimalisasi modal politik pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bukittinggi tahun 2010.

### **D. Signifikansi Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian mengenai Modal Politik Ismet Amzis-Harma Zaldi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 di Kota Bukittinggi diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap bidang akademis khususnya dalam hal konsepsi modal politik pada literatur Ilmu Politik. Khususnya dalam menganalisis fenomena dalam perwakilan politik mengenai *candidacy*. Banyak ilmuwan telah menganalisis kemenangan kandidat dengan konsep strategi politik ataupun dengan konsep marketing politik. Namun menurut penulis, konsep modal politik yang seharusnya perlu diperhatikan sebelum memulainya dengan strategi politik ataupun marketing politik, karena ketika kita berbicara marketing politik, maka kandidat sudah dianalogikan sebagai sebuah produk dalam perspektif ekonomi. Maka analogi ekonomi tersebut sudah menggambarkan

sebuah kegiatan produksi dalam politik. Darisanalah kita memahami bahwa modal politik sebagai awal dimulainya proses produksi perlu diperhatikan.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini tentunya diharapkan mampu menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian itu sendiri, selain itu juga diharapkan bisa dijadikan referensi praktis oleh para politisi dalam melakukan optimalisasi modal politik untuk memenangkan pertarungan politik.